

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Pada zaman ini untuk kemajuan dalam pengelolaan organisasi, audit internal menjadi hal yang penting dan krusial karena merupakan bagian evaluasi kegiatan yang mandiri, terpercaya, dan faktual dalam memberikan saran yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dengan metode yang tertata dan disiplin. Audit internal adalah aktivitas penilaian yang dilakukan secara independent oleh suatu bagian dalam organisasi untuk meninjau efektivitas pengendalian internal, manajemen resiko, serta tata kelola

Menurut *The Institute of Internal Auditor (IIA)* dalam (Surya et al, 2020: 15) mendefinisikan audit internal sebagai suatu kegiatan yang memberikan jaminan (*asurans*) mengenai kebenaran suatu informasi dan layanan tanpa adanya pengaruh atau kepentingan dari pihak lain yang disusun dengan tujuan untuk membantu organisasi agar beroperasi lebih efisien, efektif, dan produktif.

American Accounting Association (AAA) menyatakan bahwa audit internal adalah sebuah kegiatan sistematis untuk secara objektif mengumpulkan dan menilai pernyataan terkait tindakan serta kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan memastikan sejauh mana pernyataan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan (Muanifah et al., 2022: 5).

Audit internal adalah proses pengawasan manajerial yang bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi sistem pengendalian, guna mendukung seluruh anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Proses ini dilakukan dengan menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, serta tanggapan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang telah ditinjau (Bastian, 2019: 9).

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu rangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk menilai informasi dengan benar sehingga dapat diandalkan serta mengawasi kebijakan atau prosedur agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Audit Internal

Tujuan audit internal adalah untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih membutuhkan perbaikan sehingga melalui rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat tercapai peningkatan dalam pengelolaan berbagai program dan aktivitas di perusahaan tersebut (Surya et al, 2020: 20).

Sawyer dalam (Sumarlin, 2020: 14), audit internal berfungsi memberi penilaian terhadap seluruh aspek dalam perusahaan dan memantau operasional perusahaan dengan menyampaikan tanggapan kepada manajer agar melaksanakan perannya masing-masing dengan benar. Berikut ini beberapa fungsi audit internal:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan operasional organisasi sesuai dengan kebijakan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Memastikan bahwa asset perusahaan dapat dipertanggungjawabkan serta dilindungi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi.

3. Berkontribusi dalam meningkatkan keandalan sistem akuntansi dan kegiatan operasional lainnya.
4. Memberikan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada setiap individu.

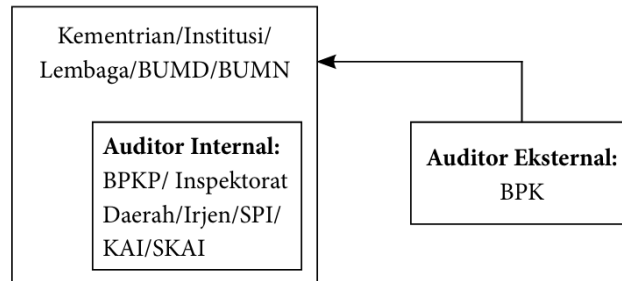
Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit internal berfungsi sebagai instrumen manajemen untuk memberikan evaluasi yang efektif dan efisien dalam memastikan kelancaran pengendalian internal organisasi. Selain itu audit internal juga memberikan masukan serta nilai tambah bagi manajemen yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Auditor

Auditor umumnya dibagi menjadi dua jenis berdasarkan siapa yang memperkerjakan mereka, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Menurut (Utary et al., 2014: 5) perbedaannya sebagai berikut:

1. Auditor eksternal, adalah pihak independent dari luar perusahaan atau instansi pemerintah, bukan karyawan Lembaga yang diaudit. Mereka bersikap netral dan tidak memihak, baik kepada pihak yang diaudit maupun kepada pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut.
2. Auditor internal, adalah pegawai dari perusahaan atau instansi pemerintah yang bertugas melakukan audit internal. Mereka melakukan penilaian secara independen dalam perusahaan atau institusi pemerintah sebagai

bentuk layanan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional lembaga tersebut.



Gambar 2. 1 Jenis-jenis Auditor

Menurut Nasution et al (2019: 9), terdapat beberapa lembaga audit internal yang bersifat permanen dan berperan membantu manajemen dalam pengawasan pengelolaan keuangan, di antaranya:

1. Badan Pengawasan Keangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai lembaga audit internal pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden.
2. Inspektorat Jenderal Kementrian, bertugas sebagai auditor internal di masing-masing kementrian atau lembaga pemerintah non-departemen.
3. Inspektorat Daerah sebagai auditor internal pada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.
4. Auditor Internal di BUMN dan Swasta, dikenal dengan istilah seperti Satuan Pemeriksa Intern (SPI) atau Kantor Audit Internal (KAI).

2.1.1.4 Peran Auditor Internal

Peran auditor internal dalam meningkatkan tata kelola organisasi atau perusahaan telah diatur dalam Standar Kinerja yang dirumuskan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) Nomor 2110 dalam (Surya et al, 2020: 73) menyatakan

bahwa aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk :

1. Membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional.
2. Mengawasi manajemen resiko dan pengendalian.
3. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang sesuai dengan organisasi.
4. Memastikan pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi berjalan efektif.
5. Mengkomunikasikan informasi terkait risiko dan pengendalian di area yang relevan.
6. Mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif antara dewan pengawas, auditor internal dan eksternal, penyedia jasa asuransi, dan manajemen.

Dari uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran inspektorat sebagai auditor internal pemerintah memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, serta sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang baik oleh inspektorat, diharapkan dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena pengawasan berfungsi untuk menilai apakah organisasi telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.1.1.5 Tanggung jawab Auditor Internal

Menurut Zamzami et al (2014: 7-8) menyebutkan adanya beberapa tanggung jawab seorang auditor internal yaitu sebagai berikut :

1. Auditor memiliki tanggung jawab untuk menjaga independensi, baik dalam sikap mental maupun dalam penampilan perilaku saat melaksanakan audit.
2. Auditor bertanggung jawab menggunakan pertimbangan professional dalam menentukan ruang lingkup dan metodologi, memilih pengujian dan prosedur yang akan diterapkan, melaksanakan audit, serta melaporkan hasilnya.
3. Auditor wajib mengungkapkan semua informasi material atau signifikan yang diketahuinya.
4. Auditor juga bertanggung jawab membantu manajemen dan pengguna lain dari laporan audit untuk memahami tugas auditor sesuai dengan standar audit dan ruang lingkup audit yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

2.1.1.6 Standar Profesi Auditor Internal

Berikut ini kriteria yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal menurut Surya et al (2020: 26) meliputi:

1. Memiliki dasar ilmu yang berkaitan dengan analisis kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh dengan tujuan memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Memiliki keahlian dalam audit dengan mengikuti pendidikan lanjutan melalui program sertifikasi seperti *Qualified Internal Auditor (QIA)*, *Certified Internal Auditor (CIA)*, *Certified Fraud Examiner (CFE)*, *Certified Control Self Assessment (CCSA)*, *Certified Information System Audit (CISA)*, dan lainnya.

3. Mengikuti program pemeliharaan sertifikasi tersebut dengan berpartisipasi dalam seminar nasional maupun internasional serta forum diskusi.
4. Mematuhi kode etik, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
5. Melaksanakan tanggung jawab yang dinyatakan dalam piagam audit dan disetujui oleh komite audit dan manajemen.
6. Memahami dan mematuhi standar profesi yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan standar yang terkait dengan kinerja dan tanggung jawab pekerjaannya.
7. Menulis artikel ilmiah dalam jurnal profesi sebagai bentuk kontribusi pada perkembangan profesi dan mengumpulkan jurnal sebagai bahan bacaan guna memperkaya pengetahuan mereka.
8. Meningkatkan literatur untuk membantu mencari solusi atas permasalahan yang ditemukan selama audit.

Selain itu, untuk menjaga kualitas hasil audit internal yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah, perlu disusun Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang merupakan kriteria atau ukuran mutu minimum dalam pelaksanaan audit intern yang harus dijadikan pedoman oleh auditor dan pimpinan APIP. Tujuan dari penyusunan Standar Audit tersebut adalah agar audit intern dilaksanakan dengan kualitas yang baik, sehingga setiap auditor dapat menghasilkan mutu hasil yang sama ketika melaksanakan penugasan sesuai dengan standar audit tersebut (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), 2014: 1-2).



Gambar 2. 2 Standar Profesi Auditor Internal

2.1.2 *Good Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Good Governance*

Good governance merupakan pelaksanaan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, yang selaras dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien mencakup upaya untuk menghindari kesalahan alokasi dana investasi, mencegah korupsi baik dari segi politik maupun administrasi, menerapkan disiplin anggaran, serta membangun kerangka hukum dan politik yang mendorong perkembangan kegiatan usaha (Edowai et al., 2021: 12).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Nofianti (2015: 52) membagi *good governance* menjadi dua pengertian yaitu : (1) nilai-nilai yang menjunjung tinggi aspirasi dan kehendak rakyat, serta nilai-nilai yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional berupa kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial; (2) aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dari penjelasan dan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *good governance* (tata kelola pemerintah yang baik) adalah suatu kegiatan

Lembaga pemerintah yang didasarkan pada kepentingan masyarakat serta norma-norma yang berlaku, untuk mewujudkan cita-cita negara. Dalam hal ini, kekuasaan dijalankan oleh masyarakat yang telah diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara, yang berkaitan dengan berbagai sumber ekonomi, sosial, dan budaya politik.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) 1997 yang dikutip oleh Khairudin et al (2021: 15-17) mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus diadopsi dan dikembangkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*).

Partisipasi merupakan dasar penting bagi demokrasi yang sehat. Setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hak ini meliputi partisipasi dalam pemilu serta keterlibatan dalam forum konsultasi, diskusi publik, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan partisipasi aktif, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka, sehingga keputusan pemerintah lebih mencerminkan kebutuhan umum masyarakat.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*).

Supremasi hukum menekankan pentingnya adanya sistem hukum yang adil dan konsisten. Setiap individu dan institusi, termasuk pemerintah, wajib mematuhi hukum yang berlaku. Ini mencakup perlindungan terhadap hak

asasi manusia, di mana setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Penegakan supremasi hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa keadilan akan ditegakkan dan pelanggaran hukum akan ditangani secara transparan dan akuntabel.

3. Transparansi (*Transparency*).

Transparansi adalah Upaya untuk menyediakan informasi yang relevan bagi publik. Pemerintah harus membuka akses terhadap data dan informasi terkait Keputusan, kebijakan, dan kegiatan mereka. Kebebasan dalam aliran informasi ini mendukung akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat mengawasi Tindakan pemerintah. Dengan transparansi, risiko korupsi dapat diminimalkan, karena pengawasan publik yang lebih baik akan mendorong praktik-praktik etis dalam pemerintahan.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*).

Responsivitas mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menanggapi kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara cepat dan efektif. Setiap Lembaga pemerintahan harus memiliki mekanisme untuk mendengarkan umpan balik dari masyarakat dan bertindak berdasarkan informasi tersebut. Mekanisme ini bisa berupa pengaduan, survey kepuasan, atau forum diskusi. Tingginya responsivitas menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap aspirasi masyarakat dan siap melakukan perbaikan yang diperlukan.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*).

Pemerintahan yang baik berfungsi sebagai mediator dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Untuk mencapai consensus, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan Keputusan, termasuk kelompok minoritas, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Proses ini tidak hanya menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan semua suara didengar dan dihargai, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat.

6. Berkeadilan (*Equity*).

Kesetaraan mengacu pada prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan program tidak bersifat diskriminatif, melainkan inklusif, dengan memberikan akses yang setara kepada semua orang, terutama kelompok yang terpinggirkan. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

7. Efektif dan Efisien (*Effectiveness and Efficiency*).

Efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan secara tepat dan optimal. Setiap program dan kebijakan harus dirancang untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.

Ini mencakup perencanaan yang baik, pengelolaan anggaran yang transparan, dan evaluasi berkala terhadap hasil dan dampak kebijakan.

8. Akuntabilitas (*Accountability*).

Akuntabilitas adalah prinsip yang menegaskan bahwa para pengambil Keputusan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat. Ini mencakup kewajiban untuk memberikan laporan yang jelas mengenai kebijakan dan Keputusan yang diambil, serta menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban. Akuntabilitas yang kuat akan meningkatkan kepercayaan public dan memastikan pemerintah bertindak demi kepentingan masyarakat.

9. Visi Strategis (*Strategic Holders*).

Visi strategis mencakup kemampuan pemimpin dan masyarakat untuk merumuskan rencana jangka Panjang yang sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemimpin harus memiliki pandangan yang luas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta menciptakan rencana Pembangunan yang berkelanjutan. Visi ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, sehingga semua pihak memiliki komitmen terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan.

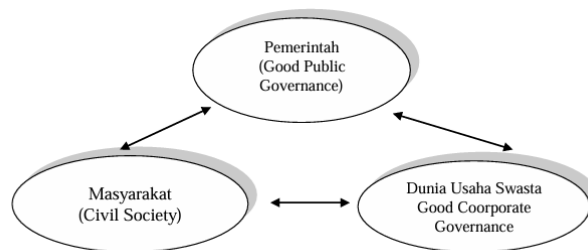
2.1.2.3 Pilar-Pilar *Good Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang dikutip oleh Khairudin et al (2021: 19) konsep good governance mencakup keseluruhan proses pembuatan yang mengintegrasikan pencapaian dari tiga pilar utama, yaitu:

- Pemerintah, berperan sebagai *good public governance*, sementara masyarakat dan sektor swasta berfungsi sebagai *good corporate governance*. Pada dasarnya, konsep pemerintahan meliputi aktivitas negara atau pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas kenegaraan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan memfasilitasi pembangunan, serta memberikan lebih banyak kesempatan kepada masyarakat dan sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan.
- Sektor swasta, berperan sebagai aktor kunci dalam pembangunan, mencakup perusahaan-perusahaan yang aktif dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, serta kegiatan di sektor informasi. Sektor non pertanian ini berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi wilayah, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan daerah.
- Masyarakat, berfungsi sebagai aktor utama dalam proses pembangunan, bukan sekedar berpartisipasi. Dalam konteks kenegaraan, kelompok masyarakat berada di antara pemerintah dan individu, yang mencakup baik individu maupun kelompok yang terlibat dalam interaksi sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penguatan kelembagaan agar masyarakat dapat mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam menjalankan fungsi produksi dan konsumsi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga penting untuk meningkatkan

efisiensi. *Good governance* hanya dapat terwujud jika didukung oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik.

Ketiga pilar dalam konsep *good governance* berada dalam ranah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan berperan lebih dominan dalam pembuatan kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. Sementara itu, sektor swasta lebih banyak berperan aktif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi. Adapun sektor masyarakat berfungsi sebagai objek sekaligus subjek bagi sektor pemerintahan dan swasta, karena di dalam masyarakat terjadi intraksi yang melibatkan bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya.



Gambar 2. 3 Tiga Pilar/Aktor Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan memiliki fungsi utama untuk memberikan informasi mengenai nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah. Informasi ini juga bertujuan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas suatu entitas pelaporan, serta memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Sementara itu, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah yang mencakup periode tertentu. Dengan demikian, laporan keuangan mencerminkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menyajikan informasi yang transparan dan akurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Anwar (2021: 21), laporan keuangan merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai suatu entitas selama satu periode akuntansi tertentu, yang berfungsi untuk mencerminkan kinerja entitas tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan, laporan keuangan dapat disimpulkan sebagai representasi terstruktur yang menyajikan gambaran posisi keuangan dan hasil kinerja keuangan suatu entitas dalam kurun waktu tertentu.

2.1.3.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi atau bahkan melampaui kriteria yang telah ditetapkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah aspek normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi agar tujuan penyusunan laporan tersebut dapat tercapai.

Menurut Anwar (2021: 7), kualitas laporan keuangan diukur berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), laporan keuangan harus disusun dan disajikan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), memiliki pengungkapan yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan pengguna, bebas dari kesalahan penyajian material, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengguna teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan sejauh mana laporan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan menyajikan informasi yang relevan dan andal. Hal ini diukur melalui opini BPK, yang memerlukan penyajian yang sesuai dengan standar, pengungkapan memadai, bebas dari kesalahan material, serta didukung oleh teknologi dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan Keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan terhadap pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Tujuan tersebut meliputi:

1. Menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, serta ekuitas yang dimiliki pemerintah
2. Menyajikan informasi tentang perubahan dalam posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.

3. Menyediakan data terkait sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Memberikan informasi tentang kesesuaian realisasi anggaran terhadap perencanaan yang telah ditetapkan
5. Memberikan informasi mengenai cara entitas pelaporan memperoleh sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya serta memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan gambaran tentang kemampuan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan
7. Menyajikan data yang berguna untuk menilai kapasitas entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya secara berkelanjutan

2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 01 mengenai Komponen Laporan Keuangan. Laporan Keuangan pokok terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah

lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini juga memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya
- 5) Lain-lain, dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivasi operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur dalam laporan arus kas sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum Negara/Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang menghubungkan antara LO dengan neraca, sehingga penyusunan LO, LPE dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Komponen dari LPE terdiri dari:

- 1) Ekuitas (awal)
- 2) Surplus/Defisit-LO
- 3) Koreksi pada Ekuitas
- 4) Ekuitas (akhir)

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan 30 Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- 4) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- 5) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- 6) Menyajikan informasi lainnya dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.3.5 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 01 mengenai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan :

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

1) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralis

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang

sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.4 Landasan Teori

Penyusunan kerangka berpikir ilmiah menekankan bahwa sebuah teori dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam praktik, sehingga hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti adalah apakah terdapat teori dasar yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan (Chandrarin, 2017: 14). Pada penelitian kali ini, *grand theory* yang mendasari adalah *Agency Theory*.

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini membahas hubungan antara rakyat dan pemerintah yang dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan, di mana rakyat sebagai (principal) menunjuk pemerintah sebagai (agent) untuk mengelola sumber daya demi kepentingan umum. Rakyat sebagai pemberi mandat mengharapkan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan terbuka dari pemerintah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat memenuhi tanggungjawab akuntabilitasnya. Laporan keuangan yang baik, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, menunjukkan bahwa pemerintah telah

transparan dan bertanggung jawab, yang mengurangi asimetri informasi antara agen dan principal serta meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah daerah pun berkewajiban melaporkan kegiatan keuangan nya secara periodik (Yuliani, 2017).

Variabel peran auditor internal kaitannya dengan *agency theory* adalah untuk mengurangi asimetri informasi antara rakyat (*principal*) dan pemerintah (*agent*). Mereka memastikan bahwa pengelolaan dana publik dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai standar yang ditetapkan, transparan, dan akuntabel dengan mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Variabel penerapan good governance kaitannya dengan *agency theory* yaitu menyediakan kerangka yang memastikan pemerintah menjalankan tugas sesuai dengan mandat rakyat dan mengelola sumber daya publik dengan efisien, sehingga hubungan antara rakyat (*principal*) dan pemerintah (*agent*) dapat berjalan dengan lancar dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Sebagai dasar acuan dan referensi yang relevan dalam penulisan prosal penelitian ini, penulis menggunakan hasil penelitian sebelumnya. Pemilihan tinjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan hasil, objek, dan subjek penelitian ini, sehingga dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

Penulis telah menyusun beberapa tinjauan dari penelitian sebelumnya yang akan menjadi dasar dalam memberikan informasi tambahan, referensi, serta perspektif dalam memahami penelitian ini. Adapun hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sebagaimana diuraikan berikut ini, yaitu:

1. Okta Veranika, Kiagus Zainal Arifin, Desi Indriasari (2022).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah. Lokasi penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah, dan peran auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2. Ady Kurnia Munggaran, Suratno, Muhammad Yusuf (2020).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Lokasi penelitian pada Kementerian Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Erfan Erfiansyah & Ia Kurnia (2018).

Melakukan penelitian dengan judul Peranan Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Lokasi penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal berperan positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

4. Istiqomah Shinta Philadhelphia, Sri Suryaningsum, Sriyono (2020).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan, dan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Ahmad Mukoffi, Yayuk Sulistyowati, Roswita Maristela Ina Reda, As'adi (2023).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Audit Laporan Keuangan, Penerapan *Good Governance*, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi penelitian pada Perusahaan Manufaktur Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal, tata kelola perusahaan yang sehat, dan audit laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

6. Desi Dwy Rachmawati & Sri Anik (2020).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance*, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP, *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kualitas aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

7. Putri Dwi Rahmadani & Nurfitri Zulaika (2023).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

8. Raibbatol Advia¹, Agus Satrya Wibowo², M. Ichsan Diarsyad (2022).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Lokasi penelitian pada Dinas Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

9. Tuti Herawati dan Defi Nopianti (2017).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan *good governance* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

10. Rachma Hida Silfa Utami, Kartika Berliani (2024).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintah memegang pengaruh yang signifikan pada kualitas laporan keuangan, sementara *good governance* tidak memegang pengaruh yang signifikan.

11. Sindy Shelika Yuntina dan Atwal Arifin (2024).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

12. Eka Puteri Ardianti (2018)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara sistem keuangan akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

13. Fitria (2024)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Lokasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

14. Raja Yoga Gustika Armel (2017)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kota Dumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

15. Cut Fitrika Syawalina dan Tina Rosmeiwati (2019)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Audit Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi penelitian pada kantor distrik navigasi Kota Sabang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran audit internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

16. Yulens Frits Bonai, Dr. Syaikhul Falah, SE., M.Si, dan Sylvia Christina Daat, SE., M.Sc., Ak (2019).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi pada pemerintah daerah Kabupaten Waropen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

17. Dewi Astri Sasmita, Nasrizal dan M. Rasuli (2020).

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansin Keuangan Daerah dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Lokasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansin keuangan daerah dan peran auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

18. Septi Masitoh, Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti (2020).

Melakukan peneltian dengan judul Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Lokasi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good government governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sementara kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

19. Fangela Myas Sari (2022)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Lokasi pada Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi

informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

20. Alvi Angelica Tabupook¹; Ika Wulandari² (2024)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lokasi pada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Terjadinya perbedaan beberapa hasil penelitian tersebut terjadi karena ada perbedaan pada objek penelitian serta waktu dilakukannya penelitian. Berikut merupakan tabel mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis:

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	(Veranika et al., 2022) Pengaruh komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah.	• Variabel independen peran auditor internal • Variabel dependen kualitas pelaporan keuangan pemerintah • Metode kuantitatif • Alat analisis SPSS • Teknik pengumpulan	• Variabel independen komitmen organisasi • Variabel independen pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah • Lokasi pada OPD Provinsi Sumatera Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah, dan peran auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.	Jurnal Syntax Transformat ion p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769 Vol. 3, No. 8, Agustus 2022 Sosial Sains Politeknik Negeri Sriwijaya

		data kuisisioner			
		•			
2	(Munggaran et al., 2020) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.	• Variabel independent auditor internal • Variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah • Metode kuantitatif • Teknik pengumpulan data kuisisioner • Alat analisis SPSS • Skala likert	• Variabel independen standar akuntansi pemerintahan • Variabel independen sistem pengendalian intern pemerintah • Lokasi pada Kemensos	Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 1, No. 5 Desember 2020 Universitas Pancasila Jakarta
3	(Erfiansyah et al., 2018) Peranan Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.	• Variabel independen peranan auditor internal • Variabel dependen kualitas pelaporan keuangan • Metode kuantitatif • Teknik pengumpulan data kuisisioner • Teknik <i>purposive sampling</i> • Alat analisis data SPSS • Skala likert	• Variabel dependen kualitas pelaporan keuangan • Lokasi pada BPR Kota Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal berperan positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan	Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi Vol. 2 No. 2 Januari - Juni 2018 E-Issn: 2621-5306 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammad Iyah Bandung
4	(Philadelphie et al., 2020) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya	• Variabel independen <i>Good governance</i> • Metode	• Variabel independen kompetensi sumber daya manusia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan, dan	Journal Of Islamic Accounting Research Vol. 2, No.

	Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Governance</i> , dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	- Kuantitatif • Teknik pengumpulan data kuisioner • Alat analisis data SPSS • Skala likert • Variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	• Variabel independen SAP • Variabel independen sistem pengendalian internal • Lokasi pada OPD	good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	1 Januari-Juni 2020 UPN “Veteran” Yogyakarta P-ISSN: 2721-5474
5	(Mukoffi et al., 2023) Pengaruh Audit Laporan Keuangan, Penerapan <i>Good Governance</i> , dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	• Variabel independen penerapan <i>good governance</i> • Variabel independen peran audit internal • Teknik purposive sampling • Teknik pengumpulan data kuisioner • Alat analisis SPSS • Variabel dependen kualitas laporan keuangan	• Variabel independen audit laporan keuangan • Lokasi pada perusahaan manufaktur Kota Malang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal, tata kelola perusahaan yang sehat, dan audit laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Jurnal Pendidikan Akuntansi ISSN: 2620-5866 Volume 6, Nomor 2, Agustus 2023 Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
6	(Rachmawati et al., 2020) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, <i>Good Governance</i> , dan Pemanfaatan	• Variabel independen <i>good governance</i> • Variabel dependen kualitas laporan keuangan	• Variabel independen penerapan SAP • Variabel independen kualitas aparatur pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan	Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4 Issn. 2720-9687 Universitas Islam Sultan Agung

	Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	• Teknik <i>purposive sampling</i> • Skala likert • Alat analisis SPSS	• Variabel independen pemanfaatan teknologi informasi	signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kualitas aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Semarang, 28 Oktober 2020
7	(Rahmadani et al., 2023) Pengaruh Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	• Variabel independen <i>good governance</i> • Variabel dependen kualias laporan keuangan • Metode kuantitatif • Teknik <i>purposive sampling</i> • Teknik pengumpulan data kuisioner • Alat analisis SPSS • Skala likert	• Variabel independen penerapan SAP • Variabel independen kompetensi SDM • Lokasi pada SKPD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan <i>good governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.2, No.1, Januari 2023 STIE Pembangunan Tanjungpinang
8	(Advia et al., 2022) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	• Variabel independen <i>good governance</i> • Variabel dependen kualitas laporan keuangan daerah • Metode kuantitatif • Teknik <i>purposive sampling</i> • Teknik pengumpulan	• Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan • Variabel kompetensi aparatur pemerintah • Lokasi Kota Palangka Raya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan <i>good governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan Vol. 14, No. 1, January 2022 ISSN 2085-7349 (print) eISSN 2829-1581 (online) Universitas Palangka Raya

		data kuisisioner		pemerintah daerah.	
		• Alat analisis SPSS			
9	(Herawati & Nopianti, 2017) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	• Variabel independen <i>good governance</i> • Variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah • Teknik pengumpulan data kuisisioner • Alat analisis SPSS • Metode kuantitatif	• Variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintahan • Lokasi Pemerintah daerah Jawa Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan <i>good governance</i> memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	STAR – Study & Accounting Research Vol XIV, No. 2 – 2017 ISSN : 1693 – 4482 Bandung Business School
10	(Utami & Berliani, 2024) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022	• Variabel independent <i>good governance</i> • Variabel kualitas laporan keuangan • Teknik pengumpulan data kuisisioner • Metode kuantitatif	• Variabel independen standar akuntansi pemerintah • Lokasi pada Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintah memegang pengaruh yang signifikan pada kualitas laporan keuangan, sementara <i>good governance</i> tidak memegang pengaruh yang signifikan	JURNAL MANEKSI VOL 13, NO. 2, JUNI 2024 p-ISSN: 2302-9560/e-ISSN: 2597-4599 Univeristas Indonesia Membangun
11	(Yuntina & Arifin, 2024) Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian	• Variabel independen <i>good governance</i> • Variabel dependen kualitas laporan	• Variabel independen sistem informasi akuntansi • Lokasi pada SKPD Sragen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan <i>good governance</i> berpengaruh	Economics and Digital Business Review Volume 5 Issue 2 (2024)

	Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	keuangan pemerintah daerah • Teknik pengumpulan data kuisisioner • Metode kuantitatif • Alat analisis SPSS		secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Pages 859 – 871 ISSN : 2774-2563 (Online)
12	(Ardianti, 2018) Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Gunungkidul)	• Variabel independen penerapan <i>good governance</i> • Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah • Teknik pengumpulan data kuisisioner • Metode kuantitatif • Teknik <i>purposive sampling</i>	• Variabel independen sitem akuntansi keuangan daerah • Variabel independen pemanfaatan teknologi informasi • Lokasi pada Skpd Kabupaten Gunungkidul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governance</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara sistem keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Ekobis Dewantara Vol.1 No. 2 Februari 2018 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
13	(Fitria, 2024) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan	• Variabel <i>good governance</i> • Variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah	• Variabel independent penerapan standar akuntansi pemerintahan • Variabel independen sistem	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian	Review of Accounting and Business Vol 4 No 2 110 E-ISSN: 2774-5287

	<i>Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.</i>	• Teknik pengumpulan data kuisioner • Metode kuantitatif • Alat analisis SPSS	• Lokasi pada SKPD Kota Bandung	internal, dan <i>good governance</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung, Indonesia
14	(Armel, 2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Dumai.	• Variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah • Teknik pengumpulan data kuisioner • Metode kuantitatif • Skala likert	• Variabel independen kompetensi sumber daya manusia • Variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintahan • Variabel independen pemanfaatan teknologi informasi • Variabel independen sistem pengendalian internal • Lokasi pada SKPD Kota Dumai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017 Riau University, Pekanbaru, Indonesia
15	(Syawalina & Rosmeiwati, 2019) Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Audit Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	• Variabel independen peran audit internal • Variabel dependen kualitas laporan keuangan • Teknik pengumpulan data kuisioner • Metode kuantitatif	• Variabel independen pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah • Variabel independen kompetensi sumber daya manusia • Lokasi pada Kota Sabang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran audit internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH Edisi : Juli – Desember 2019 VOL. 10 NO. 1 Universitas Muhammad iyah Aceh

		• Teknik <i>purposive sampling</i> • Alat analisis SPSS			
16	(Bonai et al., 2019) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi pada pemerintah daerah Kabupaten Waropen.	• Variabel independen peran auditor internal • Variabel dependen kualitas laporan keuangan • Teknik pengumpulan data kuisioner • Metode kuantitatif • Teknik <i>purposive sampling</i> • Alat analisis SPSS	• Variabel independen kapasitas sumber daya manusia • Lokasi pada pemerintah daerah Kabupaten Waropen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara peran auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Volume 2, Nomor 1, Mei 2019: 01–25 Universitas Cenderawasih
17	(Sasmita et al., 2020) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	• Variabel independen peran auditor internal • Variabel dependen kualitas laporan keuangan daerah • Teknik pengumpulan data kuisioner • Metode kuantitatif • Alat analisis SPSS • Skala likert	• Variabel independen kompetensi sumber daya manusia • Variabel independen penerapan sistem akuntansi • Lokasi pada OPD Kabupaten Rokan Hilir	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING , Vol. 15, No. 2, Oktober 2020 ISSN (print) : 1907-2473 E-ISSN 2721-8457 Universitas Riau, Indonesia
18	(Masitoh et al., 2020) Pengaruh Penerapan <i>Good Government</i>	• Variabel independen penerapan <i>good governance</i>	• Variabel independen kompetensi sumber daya manusia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>good government</i>	JES [Jurnal Ekonomi STIEP] Vol.5, No.2

	<i>Governance</i> Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	• Variabel dependen kualitas laporan keuangan daerah • Teknik pengumpulan data kuisioner • Metode kuantitatif • Alat analisis SPSS	• Lokasi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten	<i>governance</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sementara kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah	,November 2020 STIE PANDU MADANIA BOGOR e-ISSN 2654-4288
19	(Sari, 2022) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, <i>Good Governance</i> dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	• Variabel independen <i>good governance</i> • Variabel dependen kualitas laporan keuangan daerah • Teknik pengumpulan data kuisioner • Metode kuantitatif • Alat analisis SPSS • Teknik <i>purposive sampling</i> •	• Variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintah • Variabel kualitas aparatur pemerintah daerah • Variabel independen pemanfaatan teknologi informasi • Lokasi pada Kabupaten Batang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara kualitas aparatur pemerintah daerah dan <i>good governance</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing Vol.3 (No.1), 2022, Hal: 27 – 42 ISSN 2723 – 2522 (Online) Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan
20	(Tabupook & Wulandari, 2024) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan <i>Good Governance</i> Terhadap	• Variabel independen <i>good governance</i> • Variabel dependen kualitas laporan keuangan	• Variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintahan • Lokasi pada Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan <i>good governance</i>	JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 8 No. 3, 2024

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	pemerintah daerah • Teknik pengumpulan data kuisisioner • Metode kuantitatif • Alat analisis SPSS • Skala likert	Sulawesi Tengah	berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306 Universitas Mercubuana
--	---	-----------------	---	--

Yammira Siti Annisa (2024)
 Pengaruh Peran Auditor Internal dan Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya)

2.2 Kerangka Pemikiran

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang berfungsi sebagai landasan dalam penerapan berbagai teknik. Kerangka dasar ini terdiri atas standar-standar praktik seperti teknik dan prinsip yang diakui secara luas karena kegunaan serta kelogisannya. Standar akuntansi disusun berdasarkan peraturan berdasarkan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga resmi. Dalam akuntansi sektor publik, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mencakup prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Dengan laporan keuangan yang lebih berkualitas, pemerintah dapat menyediakan informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan, mendukung transparansi, serta memperkuat akuntabilitas publik.

Fungsi auditor internal adalah untuk memberikan saran kepada manajemen terkait pengelolaan resiko, pengendalian internal, dan tata kelola (Arens et al, 2015: 17). Auditor internal memiliki akses langsung terhadap sistem pengendalian internal pemerintah. Melalui audit dan evaluasi menyeluruh atas pengendalian internal, auditor internal dapat menilai efektivitas sistem tersebut dalam menjaga keakuratan laporan keuangan. Jika ditemukan kelemahan atau ketidakefektifan dalam pengendalian, auditor dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun indikator dari peran auditor internal yang dicakup dalam (SPAI, 2023) (SPAI): (1)Independensi, (2)Etika professional, (3)Kompetensi, (4)Perencanaan dan penyelenggaraan, (5)Pelaksanaan audit, (6)Komunikasi dan pelaporan, (7)Tindak lanjut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mukoffi, Yayuk Sulistyowati, Roswita Maristela Ina Reda, As'adi (2023) bahwa peran auditor internal mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cut Fitrika Syawalina & Tina Rosmeiwati (2019), (Dewi Astri Sasmita, Nasrizal dan M. Rasuli (2020),Okta Veranika, Kiagus Zainal Arifin, dan Desi Indrisari (2022) bahwa peran auditor internal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

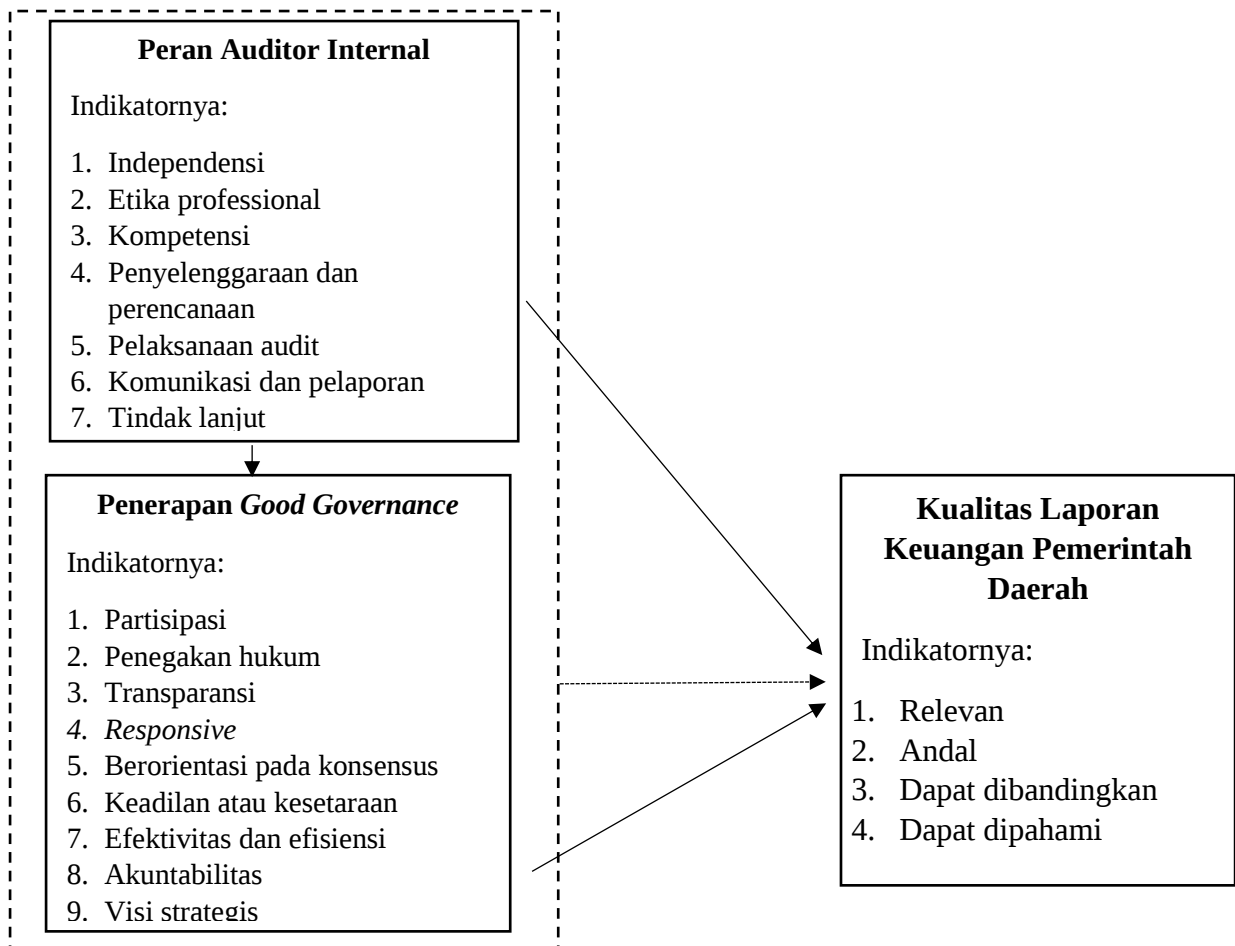
Penerapan tata kelola yang baik di pemerintah daerah bukan hanya menghasilkan informasi keuangan yang berintegritas, namun mendorong kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Yuntina et al, 2024). *Good governance*

merupakan konsep pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik serta berfokus pada pembangunan sektor publik (Mardiasmo, 2018: 22). Indikator yang harus dicapai dari oleh pemerintah daerah yaitu: (1)Partisipasi, (2)Penegakan hukum, (3)Transparansi, (4)Responsive, (5)Berorientasi pada konsensus, (6)Keadilan atau kesetaraan, (7)Efektivitas dan efisiensi, (8)Akuntabilitas, (9)Visi strategis. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mukoffi, Yayuk Sulistyowati, Roswita Maristela Ina Reda, As'adi (2023) bahwa *good governance* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Istiqomah Shinta Philadelphia, Sri Suryaningsum, Sriyono (2020), Desi Dwy Rachmawati & Sri Anik (2020) dan Putri Dwi Rahmadani & Nurfitri Zulaika (2023) bahwa *good governance* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan mencerminkan sejauh mana informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, laporan keuangan yang berkualitas tinggi menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dapat diandalkan dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan (Yuntina et al, 2024). Dalam sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat atau sektor publik. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik dan mudah dimengerti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan harus memenuhi beberapa indikator yaitu: 1)Relevan, 2)Andal,

3)Dapat dibandingkan, 4)Dapat dipahami. Dalam upaya mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, peran auditor internal dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi elemen krusial. Auditor internal memiliki tugas untuk memastikan keandalan laporan keuangan melalui audit dan pengawasan yang dilakukan secara berkala. Sedangkan penerapan prinsip *good governance* mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan. Oleh karena itu, ketika peran auditor internal dalam melakukan audit keuangan berjalan secara efektif, maka tata kelola pemerintahan akan tercapai sesuai prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran auditor internal dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Beberapa penelitian terdahulu mendukung asumsi ini, seperti yang disampaikan oleh (Mukoffi et al., 2023), bahwa peran auditor internal yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui pengawasan yang ketat dan independen. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani et al, 2023) menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang relevan dan andal di sektor publik.

Berdasarkan hasil kerangka pemikiran dan didasari oleh penelitian terdahulu maka berikut digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019: 99), hipotesis adalah solusi sementara atas rumusan masalah dalam penelitian, yang umumnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Disebut sementara karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan teori-teori yang relevan, bukan pada fakta empiris yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Oleh karena itu hipotesis dapat pula diartikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah, belum merupakan jawaban yang didukung oleh bukti empiris.

Maka hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan signifikan Peran Auditor Internal dan Penerapan *Good Governance* pada SKPD Kota Tasikmalaya.
2. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan Peran Auditor Internal dan Penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya.